

Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan Melalui Kurikulum

Irwan Maulana¹, Iin Nurul Inayah², Anis Suryaningsih³, Ahmad al gufron⁴,
Ofik Taufiqurrohman⁵

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor¹, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Serang²,
Universitas Sebelas Maret Surakarta³, Institut Agama Islam Negeri Manado⁴, Institut
Agama Islam Banten⁵,

irwan.maulana@iuqibogor.ac.id¹, iin.nurul.inayah24@gmail.com²,
anissuryaningsih@staff.uns.ac.id³, algufronahmad4@gmail.com⁴
masstaufiq0@gmail.com⁵

ABSTRACT

The sustainable education policy in Indonesia is designed as a response to global challenges such as climate change, social inequality, and technological advancements. This research aims to explain the implementation of sustainable policies in facing various obstacles, including infrastructure limitations, suboptimal curriculum integration, low public awareness, lack of stakeholder collaboration, and the digital divide. This study employs a literature review method, focusing on examining literature related to the implementation of sustainable education policies through the curriculum. Data collection is conducted by gathering literature sources, reading, taking notes, and managing research findings objectively, systematically, analytically, and critically, considering publication years and the most recent studies. The findings of this research indicate the need for improving the quality of sustainable education by focusing on curriculum integration, strengthening infrastructure, increasing public awareness, enhancing cross-sector collaboration, and utilizing technology to expand access to education. With the right strategies, sustainable education is expected to create a generation with high awareness of social, economic, and environmental aspects.

Keywords: Sustainable education, education policy, curriculum, infrastructure, technology

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan berkelanjutan di Indonesia dirancang sebagai respons terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan berkelanjutan menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya integrasi dalam kurikulum, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kolaborasi pemangku kepentingan, serta kesenjangan digital. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini fokus meneliti mengenai literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan melalui kurikulum. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola hasil penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis dengan melihat tahun terbit dan penelitian paling mutakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan yang berfokus pada integrasi kurikulum, penguatan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pendidikan. Dengan strategi yang tepat, pendidikan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan generasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kata kunci: Pendidikan berkelanjutan, kebijakan pendidikan, kurikulum, infrastruktur, teknologi

PENDAHULUAN

Pendidikan berkelanjutan adalah konsep pendidikan yang menekankan pada pentingnya pengembangan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan sosial di masa depan (Malihah, 2022). Implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan ini memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar lingkungan, berwawasan luas, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini perlu diwujudkan agar dapat mewujudkan Indonesia emas seperti yang diharapkan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuan mewujudkan pendidikan berkualitas melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Isi dari pendidikan berkualitas ini mencakup akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua (Farkhan et al., 2022). Akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas ini memungkinkan pemerintah mampu mewujudkan Indonesia emas yang berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional. Kebijakan berkelanjutan di Indonesia sangat relevan dengan adanya tantangan perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kemajuan teknologi yang pesat (Malihah, 2022). Hal ini perlu direspons dengan merancang kebijakan yang memiliki berbagai macam aspek seperti kurikulum ramah lingkungan, pelatihan guru yang berpihak pada pendidikan inklusif, dan penyesuaian metode pembelajaran agar peserta didik tidak hanya berfokus pada nilai akademis.

Isu-isu global seperti perubahan iklim dan rusaknya ekosistem kehidupan harus menjadi salah satu isu utama yang harus diperhatikan. Melalui kurikulum, diharapkan lulusan yang dihasilkan memiliki pemahaman mendalam tentang dampak dari setiap tindakan mereka terhadap ekosistem serta memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masa depan (Berkelanjutan et al., 2021).

Perumusan kebijakan yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum ini perlu adanya sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sehingga diharapkan menghasilkan hasil yang ideal. Akan tetapi, hal ini masih perlu ditingkatkan. Lemahnya koordinasi yang sistematis dalam penyusunan kebijakan dan implementasi dan pemerintah masih fokus pada aspek regulasi tanpa melibatkan institusi pendidikan secara mendalam, menjadi masalah yang harus diselesaikan. Selain itu, masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi pendidikan, menyebabkan kurangnya rasa memiliki dan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Fakta ini diperkuat oleh berbagai studi yang menunjukkan perlunya kolaborasi lintas sektor yang lebih baik untuk mencapai hasil yang optimal dalam implementasi pendidikan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran, serta resistensi dalam adopsi kurikulum baru yang menekankan keberlanjutan. Akan tetapi, dengan adanya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan seperti

pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi internasional, pendidikan berkelanjutan dapat menjadi landasan penting dalam menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap keberlanjutan dan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan secara global (Farkhan et al., 2022).

Adanya Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992 membantu meningkatkan kebijakan berkelanjutan. Salah satu efek dari hal ini adalah menjadikan pendidikan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan. Banyak negara mulai memasukkan isu-isu keberlanjutan ke dalam kebijakan pendidikan sebagai isu nasional mereka.

UNESCO ikut andil dalam mewujudkan pendidikan untuk Pembangunan berkelanjutan. Hal ini mendorong adanya integrasi mengenai isu lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik ke dalam kurikulum baik kurikulum formal maupun non formal (Chan, 2023). Saat ini, berbagai inisiatif untuk mendukung kebijakan pendidikan berkelanjutan terus berkembang, terutama melalui program pendidikan lintas negara yang dipromosikan oleh organisasi internasional seperti UNESCO dan UNICEF. Program-program ini mencakup pelatihan guru, pengembangan materi pembelajaran yang ramah lingkungan, dan pembentukan jaringan sekolah yang fokus pada keberlanjutan. Selain itu, beberapa negara mulai menggunakan teknologi digital untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan berkelanjutan, misalnya melalui kursus daring, sumber daya digital, dan platform pembelajaran interaktif yang dapat diakses oleh peserta didik di daerah terpencil. Dengan kemajuan teknologi ini, peserta didik dari berbagai latar belakang dapat mengakses pendidikan yang relevan dengan tantangan global, tanpa terbatas oleh faktor geografis atau ekonomi (For & Development, 2024).

Pada tataran perguruan tinggi, pendidikan berkelanjutan dikelola melalui program-program khusus yang berfokus pada keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan, baik dalam bentuk mata kuliah maupun program studi penuh. Perguruan tinggi tersebut membangun fakultas atau pusat studi yang memfokuskan penelitian mereka pada isu-isu keberlanjutan, seperti mitigasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi hijau, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan berkelanjutan tidak hanya diperkenalkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga semakin diterima di pendidikan tinggi sebagai bidang kajian yang penting. Beberapa negara telah berhasil melakukan reformasi signifikan, seperti memperkenalkan program studi khusus tentang perubahan iklim, manajemen sumber daya, dan keberlanjutan sosial dalam berbagai jenjang Pendidikan (Daud, 2024). Upaya kolaboratif, termasuk bantuan internasional dan inisiatif bersama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta, terus dikembangkan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan bahwa manfaat dari kebijakan pendidikan berkelanjutan dapat dirasakan secara luas (Suyana et al., 2024).

TINJAUAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkelanjutan

Implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan, menekankan pada pentingnya respons perubahan sosial dan lingkungan yang makin kompleks. Implementasi sering diidentikkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan kebijakan adalah seperangkat gagasan dan prinsip yang menjadi acuan dalam menjalankan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Maisaroh & Untari, 2024). Kebijakan pendidikan ini merupakan respons terhadap tantangan yang terus berkembang, terutama di era perkembangan teknologi dan industri berimplikasi besar terhadap lingkungan sehingga membawa dampak negatif bagi masyarakat seperti pencemaran plastik dan peningkatan emisi karbon. Masalah ini perlu direspons melalui pendidikan dalam membentuk kesadaran dan pengetahuan peserta didik mengenai keberlanjutan lingkungan dan sosial sejak dini.

Kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan (Kusriyah & Witasari, 2024). Tujuan kebijakan pendidikan berkelanjutan di Indonesia adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Hal ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya secara berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik, akan tetapi membekali generasi mendatang dengan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada praktiknya penerapan ini di Indonesia memiliki tantangan-tantangan berupa akses pendidikan yang tidak merata dan mengatasi kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat (Malihah, 2022).

Kebijakan pendidikan berkelanjutan berupaya meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Salah satu program yang diperkenalkan yaitu Adiwiyata. Program ini diperkenalkan untuk menanamkan nilai-nilai lingkungan melalui kegiatan sekolah yang bersifat partisipatif dan mengintegrasikan kurikulum yang berfokus pada hal yang berkelanjutan. Akan tetapi, adanya keterbatasan dukungan kelembagaan serta kendala dalam pendanaan dan sumber daya sering kali menghambat pencapaian tujuan ini secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan lebih dari pemerintah dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai yaitu memiliki kesadaran akan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat di masa mendatang (Anggraini Dewi, 2024).

Implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan di Indonesia juga berupaya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek pendidikan berkualitas dan inklusif (SDG 4). Keberhasilan penerapan pendidikan berkelanjutan menuntut adanya kurikulum yang menyatu dengan prinsip

keberlanjutan serta penguatan pada sektor kebijakan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian tujuan SDGs. Tantangan yang senantiasa dihadapi adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan konsep pendidikan berkelanjutan secara eksplisit. Diperlukan pembenahan agar kurikulum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Primasti, 2021).

Kurikulum Pendidikan Berkelanjutan

Kurikulum dalam pendidikan memiliki peranan sangat penting. Kurikulum dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam pembelajaran (Irwan Maulana, 2023). Kurikulum didesain sebaik mungkin sesuai dengan lulusan yang diinginkan. Kurikulum pendidikan berbasis konservasi dan teknologi telah diidentifikasi sebagai langkah nyata dalam mencapai SDGs. Di dalam kurikulum ini perlu dimuat tentang pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, pada memasukkan nilai-nilai sebagai *hidden value* mengenai lingkungan juga perlu dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai keberlanjutan yang membantu peserta didik memahami pentingnya melindungi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pendidikan yang mencakup aspek lingkungan ini mempersiapkan individu agar dapat menghadapi masalah seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam dengan lebih efektif (Faizah, 2024).

Pengintegrasian nilai-nilai baik yang berasal dari agama, budaya, dan *common sense*, di dalam kurikulum membantu mempercepat keberhasilan pendidikan berkelanjutan. Nilai-nilai Islam yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad yang berkaitan tentang menjaga dan memelihara lingkungan akan memberikan kesadaran yang mendalam akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan dinilai sebagai salah satu tugas manusia (Istiqomah Rahmawati et al., 2021). Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang pancadarma yang terhimpun dalam lima asas pemikiran, yaitu asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan (Habsy et al., 2024). Oleh karena itu, kurikulum pendidikan berkelanjutan juga membutuhkan sebuah fondasi nilai yang kuat sebagai sumber kesadaran manusia akan tugasnya.

Kurikulum ini perlu disusun dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor, komitmen politik, dan inovasi teknologi. Kemudian, perlu adanya kebijakan pendidikan yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang mendukung. Kolaborasi ini penting untuk membentuk sebuah pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan, menyediakan infrastruktur dan dukungan bagi terciptanya pendidikan yang inklusif dan merata. UNESCO mendorong Lembaga pendidikan akan pentingnya *Education for Sustainable Development (ESD) 2030*. Hal ini berfokus mengenai penguatan kebijakan, transformasi lingkungan belajar, dan pemberdayaan generasi muda. Konsep ini perlu didukung oleh kebijakan dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan di Indonesia tidak hanya akan mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga sadar akan keberlanjutan, sejalan dengan

prioritas UNESCO yang diharapkan dapat menggerakkan peserta didik dan masyarakat untuk berkontribusi positif bagi lingkungan dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Vilosa & Yuadi, 2024).

Tantangan Indonesia Ke Depan

Tantangan Indonesia ke depan mengenai berbagai macam persoalan yang dihadapi semakin banyak. Di dalam Lembaga pendidikan sendiri terdapat masalah signifikan yang terkait dengan adaptasi kurikulum, kesenjangan teknologi, dan perubahan sosial (Fajri, A, 2022). Kurikulum harus dirancang untuk menghadapi era modern dengan pembelajaran yang responsif, fleksibel, dan relevan. Permasalahan yang dihadapi adalah, ketidakseimbangan Akses dan Fasilitas Pendidikan, Kurikulum yang Tidak Responsif terhadap Kebutuhan Lokal, Ketergantungan pada Teknologi dan Tantangan Digitalisasi, Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan, Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi dalam Pendidikan Berkelanjutan, Tantangan Perubahan Sosial dan Globalisasi (Abudiin Nata, 2019).

Keterbatasan infrastruktur seperti gedung sekolah yang tidak memadai, kurangnya fasilitas belajar menjadi masalah tersendiri terutama bagi daerah 3T. Situasi ini diperburuk dengan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, sehingga sulit untuk mengikuti kurikulum nasional yang sering berubah sesuai kebijakan kementerian pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali mengikuti standar nasional yang seragam, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pendidikan berkelanjutan, terutama di daerah perbatasan yang memiliki kebutuhan spesifik. Hal ini juga perlu dikompromikan di dalam kurikulum dan diperkuat dengan kebijakan pemerintah (Astuti & Khoiri, 2022).

Dalam era digital, pendidikan berkelanjutan semakin bergantung pada teknologi untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Namun, tantangan teknologi seperti keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi di daerah terpencil menghambat implementasi pendidikan berkelanjutan. Aplikasi teknologi dalam pendidikan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar dapat mendukung proses pembelajaran interaktif dan berkelanjutan. Di wilayah terpencil, minimnya akses ke perangkat digital memperburuk ketimpangan dalam pendidikan, sehingga memperlambat adaptasi terhadap perubahan global yang cepat (Abuddin Nata 2019).

Tantangan implementasi pendidikan berkelanjutan juga terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Pendidikan berbasis konservasi dan teknologi, misalnya, membutuhkan anggaran besar untuk penyediaan sarana yang memadai dan pengembangan keterampilan tenaga pengajar. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran yang mencukupi berakibat pada tidak optimalnya penerapan pendidikan berkelanjutan. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, terutama di tingkat lokal, masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami peran pendidikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas hidup dan pelestarian lingkungan. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan partisipasi yang minim dalam program-program pendidikan

berkelanjutan yang memerlukan dukungan penuh dari masyarakat dan lembaga Pendidikan.

Perubahan sosial dan globalisasi menuntut kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia modern. Tantangan ini sulit dihadapi jika sistem pendidikan masih berfokus pada pendekatan tradisional. Dalam konteks ini, pendidikan harus dapat menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan adaptif, yang sering kali sulit dicapai dengan pendekatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendidikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif, dukungan infrastruktur yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang aktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia (Vilosa & Yuadi, 2024).

Transformasi pendidikan yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat menjadi penting agar generasi mendatang dapat menghadapi dinamika global dengan keterampilan kritis, seperti literasi digital dan pemikiran kreatif. Ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan pendekatan holistik dalam pendidikan untuk membangun karakter yang kuat dan kemampuan yang relevan, termasuk dalam lingkungan yang kurang berkembang seperti wilayah perbatasan di Indonesia (Faizah, 2024). Sebagai fondasi penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan berkelanjutan berperan dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran sosial dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Di dalam konteks ini, pendidikan harus merespons kebutuhan pasar kerja yang dinamis dengan keterampilan baru yang berfokus pada pemecahan masalah, literasi digital, dan kemampuan berkolaborasi. Pendidikan ini juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam keberlanjutan, baik dalam aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial, sehingga mampu menghadapi dinamika global yang semakin kompleks (Faizah, 2024).

Selain itu, pendidikan berkelanjutan memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya pembelajaran sepanjang hayat. Partisipasi semua pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang responsif dan fleksibel di berbagai wilayah. Dengan pendekatan yang holistik, pendidikan berkelanjutan berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembentukan individu yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat (Berkelanjutan et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur. Penelitian kepustakaan adalah upaya sistematis dalam mengakses, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai macam materi yang tersedia di perpustakaan yang meliputi referensi buku, penelitian terdahulu, artikel catatan, dan jurnal untuk mendukung dan menjawab permasalahan penelitian. Studi literatur pada penelitian ini fokus meneliti mengenai implementasi

kebijakan pendidikan berkelanjutan melalui kurikulum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola hasil penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan mengenai kurikulum. Studi literatur pada penelitian ini sejatinya dilakukan dengan pendekatan penelitian lainnya akan tetapi, pengambilan datanya mengambil dari sumber pustaka, membaca, menganalisis dan mencatat hasilnya. Teknik analisa data menggunakan *content analysis* atau analisis isi. Analisis isi digunakan untuk meneliti literatur yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Kemudian, dilakukan studi dengan melihat tahun terbit dari mulai yang paling mutakhir, mutakhir, sampai tidak mutakhir tetapi memiliki substansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian peneliti membaca abstrak yang kemudian akan diteliti dan dicatat secara detail oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan berkelanjutan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama dalam penerapan kurikulum berbasis keberlanjutan. Hal ini juga diperkuat dengan masih banyak sekolah di daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, dan sumber daya pendukung lainnya. Kurikulum pendidikan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan secara sistematis oleh karena itu, sekolah perlu berinovasi untuk menghadapi masalah ini. Kurangnya integrasi konsep keberlanjutan dalam kurikulum menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan generasi yang memiliki kesadaran lingkungan, sosial, dan ekonomi yang kuat.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan masih tergolong rendah. Hal ini berakibat pada minimnya keterlibatan dalam program pendidikan berbasis keberlanjutan. Implementasi pendidikan berkelanjutan memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Akan tetapi, sinergi antara pemangku kepentingan masih belum optimal, menyebabkan kebijakan yang telah dirancang tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berkelanjutan, kesenjangan digital masih menjadi tantangan, terutama bagi daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai.

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan infrastruktur pendidikan yang lebih merata, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penyediaan fasilitas yang memadai serta pelatihan guru dalam menerapkan kurikulum berbasis keberlanjutan menjadi aspek yang krusial. Diperlukan revisi dan inovasi dalam kurikulum agar pendidikan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Kurikulum harus mencerminkan prinsip keberlanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga mengembangkan kesadaran lingkungan dan sosial dalam setiap mata pelajaran.

Sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan harus ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan pelibatan komunitas. Program-program

seperti sekolah hijau, kampanye sadar lingkungan, serta keterlibatan orang tua dalam pembelajaran berbasis keberlanjutan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dalam mengembangkan program pendidikan yang mendukung prinsip keberlanjutan. Kolaborasi ini dapat berupa penyediaan sumber daya, pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam memperluas akses pendidikan berkelanjutan. Pengembangan platform digital yang menyediakan materi pembelajaran interaktif serta penguatan infrastruktur internet di daerah terpencil dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat implementasi kebijakan ini. Dengan adanya upaya yang terstruktur dan kolaboratif, pendidikan berkelanjutan di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya integrasi dalam kurikulum, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Diperlukan upaya yang lebih insentif untuk mewujudkannya dengan cara meningkatkan dukungan infrastruktur dan sumber daya pendidikan, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara lebih sistematis dalam kurikulum,

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan berkelanjutan, memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat, memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara pemangku kepentingan serta penerapan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif, diharapkan pendidikan berkelanjutan di Indonesia dapat menjadi fondasi dalam menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki keterampilan akademik yang kuat tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini Dewi, N. S. (2024). Menuju pendidikan berkelanjutan: Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mewujudkan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 189–197.
- Astuti, R. S., & Khoiri, Q. (n.d.). Tantangan lokal dan global kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia.
- Chan, C. K. Y. (2023). A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00408-3>

- Daud, Y. M. (2024). Perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia: A systematic literature review. *Intelektualita*, 13(1), 115–131. <https://doi.org/10.22373/ji.v13i1.24871>
- Faizah, A. N. (2024). Pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi sebagai aksi nyata dalam mewujudkan SDGs. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 73–80.
- Fajri, A. (2022). *Kebijakan pendidikan di Indonesia: Evaluasi dan tantangan*. PT Pustaka Nasional.
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- For, E., & Development, S. (2024). Kebijakan pendidikan berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 17, September.
- Habsy, B. A., Rohida, A. I., Sudarsono, M., Firdaus, M., & Anzhani, V. A. (2024). Tantangan pendidikan abad ke-21: Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasi Kurikulum Merdeka.
- Kusriyah, S., & Witasari, A. (2024). Sosialisasi kebijakan penataan ruang melalui pemanfaatan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 11(1), 16–24. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v11i01.5680>
- Maisaroh, A. A., & Untari, S. (2024). Transformasi pendidikan karakter melalui kebijakan pemerintah di Indonesia menuju generasi emas 2045. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(1), 18–30. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4347>
- Malihah, L. (2022). Tantangan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan: Sebuah tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219–232. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>
- Maulana, I. (2023). *Kurikulum pendidikan* (1st ed.). Komentar.
- Nata, A. (2019). *Pendidikan Islam di era globalisasi*. Prenada Media.
- Primasti, S. G. (2021). Implementasi program Education for Sustainable Development di SMA Tumbuh. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10(3), 80–100. <https://doi.org/10.21831/sakp.v10i3.17465>
- Rahmawati, I., Iqramullah, M. A., & Zulkarnain. (2021). Mempersiapkan generasi khalifah (Tinjauan terhadap kekhalifahan Adam A.S. dalam surat Al-Baqarah ayat 30-37). *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.51468/jpi.v3i1.56>
- Rochmawati, I., Ningtias, K., & Lukitowati, S. (2021). Sustainable policy: Study of education policy at the Aruk border, Sambas Regency, West Borneo. *Jurnal Kebijakan dan Studi Pembangunan*, 26(1).

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 5 (2025) 1454 - 1464 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i5.7216

Suyana, N., Pendidikan, P. K., Global, T., & Pendidikan, S. (2024). Kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan global: Sebuah analisis strategis dan prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620–634.

Vilosa, B., & Yuadi, I. (2024). Analisis bibliometrik tentang tren penerapan kebijakan kota hijau (green city). *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 8(2), 162–178. <https://doi.org/10.36813/jplb.8.2.162-178>